

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Salah satu instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diharapkan mampu membentuk watak warga negara yang mengetahui, menyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "*civic intelligence*", "*civic participation*", dan "*civic responsibility*" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winatapura, 2001).

Di Indonesia kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara teoretik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif,

dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2008: 24).

Dalam praktik pendidikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tahun-tahun terakhir ini telah mengalami degradasi yang mengawatirkan, bahkan nilai-nilai kearifan lokal telah tergerus oleh arus pendidikan global. Kondisi ini berakibat menipisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa. Dunia pendidikan dianggap tidak mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, yakni manusia Indonesia seutuhnya seperti cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam undang-undang pendidikan Nasional. Merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga disebabkan karena mengendornya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal kesadaran kolektif tersebut merupakan modal dasar dan modal sosial serta *character and nation building* guna memperkokoh integrasi bangsa.

Karakter warganegara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan jamannya. Cerminan dari karakter warganegara Indonesia tampak dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan sejumlah tujuan pendidikan nasional yang pada hakekatnya menunjuk pada sejumlah karakter warganegara yang diinginkan.

Menurut Budimansyah (2008: 24-25), dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; serta (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan maka terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan substansi materi yang harus diketahui oleh siswa sebagai warganegara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warganegara adalah mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah keterampilan yang

dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang dimiliki tersebut menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual (*intelektual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*).

Kemudian, watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Quigley dkk (1991), *civic disposition* adalah "...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system". Secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni "*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles*" (Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991: 13-14).

Merujuk pada penjabaran PKn di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*), yakni menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang baik selalu menimbulkan kerumitan, karena: *pertama*, pendidikan kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik. *Kedua*, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan, atribut "baik" dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan. *Ketiga*, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (urusan publik) tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif, yakni tidak hanya menjadi "warga negara yang baik" (*good citizen*) tetapi juga menjadi "warga negara yang aktif" (*active citizen*)

Realitas di lapangan tampak ada gejala keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain

Pendidikan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues*, (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif. Akibatnya, proses pembelajaran menimbulkan kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik (Samsuri, 2010: 130).

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama dilakukan analisis SWOT terhadap pembelajaran PKn yang berlangsung saat ini. Hasilnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Kekuatan pembelajaran PKn adalah 1) Adanya dukungan pemerintah, Dikpora, dan sekolah dalam implementasi PKn, 2) Ditetapkannya PKn sebagai mata pelajaran wajib di Pendidikan Dasar dan Menengah, 3) Komitmen dari sekolah dan Guru untuk melaksanakan pembelajaran PKn, 4) Adanya MGMP pembelajaran PKn, 5) PKn sebagai Pendidikan Pancasila dalam Praktek, 6) Adanya kemauan guru melakukan berbagai variasi metode pelajaran; 7) Adanya ketegasan guru dalam menegakkan disiplin; 8) Adanya kemauan guru meningkatkan profesionalisme dengan studi banding; 9) Kemauan guru mengikuti perkembangan pembelajaran PKn; 10) Kemauan guru menjadi *role model* dan menunjukkan tokoh-tokoh yang dapat menjadi panutan.

Kelemahan pembelajaran PKn yang sedang berlangsung, antara lain 1) Pendidikan kewarganegaraan rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik; 2) Materi PKn tidak menarik dan formalistik; 3) Konsep kewarganegaraan berkaitan dengan atribut "baik" dari seorang warga negara yang juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika kenegaraan; 4) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan semata-mata menampilkan nilai moral; 5) Pendidikan Kewarganegaraan kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai; 7) Proses pembelajaran cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues*; 8) Pembelajarannya cenderung bersifat hafalan kognitif; 9) Proses pembelajaran menimbulkan kejenuhan, karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik.

Peluang untuk mengembangkan model pembelajaran PKn yang inovatif antara lain adalah 1) Proses pembelajaran PKn dapat dilakukan dengan belajar sambil berbuat

(*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural (*enculturation and socialization*), belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat; 2) Materi *content informal* dalam PKn yang bersifat kontekstual dapat dikembangkan sesuai dengan realitas sosial budaya peserta didik; 3) Misi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*); 4) Tujuan pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan warga negara yang aktif (*active citizen*); 5) Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya bangsa.

Ancaman terhadap pembelajaran PKn adalah 1) Globalisasi berdampak pada homogenitas budaya yang melanda dunia; 2) Menurunnya etika sopan santun dan kuatnya budaya kekerasan; 3) Kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal; 4) Menurunnya implementasi nilai-nilai Pancasila; 5) Pudarnya jati diri bangsa Indonesia sebagai dampak pengaruh budaya global.

Dengan melihat berbagai kekuatan dan peluang pembelajaran PKn serta dengan mempertimbangkan kelemahan dan ancaman terhadap pembelajaran PKn relevansinya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila maka perlu dilakukan revitalisasi terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk awal model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa?
2. Bagaimanakah desain hasil pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa? Selanjutnya, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah hasil uji validasi model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

- berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa oleh tim ahli?
- b. Bagaimanakah deskripsi model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa?
 3. Bagaimanakah efektifitas model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa?